

PENATAAN KOTA SINGARAJA ZAMAN KOLONIAL BELANDA (PERSPEKTIF SEJARAH KOTA)

K.S. Arta,¹ I.M. Pageh,² I.W.P. Yasa³

^{1,2,3} Prodi Sejarah, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

e-mail: sedana.arta@gmail.com, made.pageh@undiksha.ac.id, putrayasa@undiksha.ac.id.

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah 1) untuk mengetahui gambaran jelas tentang kosepsi dan tata ruang yang berciri tradisional di Kerajaan Buleleng, 2) untuk memperoleh gambaran jelas landcape Kota Singaraja sebagai kota kolonial Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi kesejarahan yang meliputi langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi, dan Hinstoriografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa landcape kota Singaraja dibangun berdasarkan perpaduan *landcape* tradisional (geo-religijs) dengan *landcape* modern yang berorientasi pada kehidupan duniawi, sifat rasional ini ditunjukkan dengan adanya sanitasi lingkungan, jalan raya besar untuk transportasi modern, tempat hiburan, sekolah, pusat tentara, penjara, pengadilan dan wujud orientasi dunia barat lainnya. Sarana kota modern tersebut dimaksudkan untuk mengukuhkan kekuasaan kolonial Belanda. Tulisan dengan pendekatan ekohistoris ini dapat dikembangkan menjadi bahan pembelajaran untuk memahami strategi kolonial Belanda dalam mengurung kekuasaan tradisional yang sangat sacral dengan kekuasaan serba nyata, propan, serba iptek dan bernilai kekuasaan politik, ekonomis dan prestige sosial. Rekomendasi yang diberikan adalah diharapkan pengembangan kota Singaraja sekarang juga memperhatikan pengembangan wilayah pada masa pemerintahan kolonial Belanda, dan tetap menjaga artefak-artepak/ bangunan kolonial yang bisa dijadikan daya Tarik pariwisata

Kata Kunci: Penataan Kota; Landcape tradisional; Landcape modern.

Abstract

Target of this article is 1) to know clear picture about planology and kosepsi which distinguishing traditional in Empire of Buleleng 2) to obtain get clear picture of Town landcape of Singaraja as colonial town of Belanda. Article this indicate that town landcape of Singaraja woke up pursuant to solidarity of traditional landcape (geo-religijs) with modern landcape which orient at earthly life, nature of this rational shown with existence of environmental sanitasi, highway for modern transportation, hotspot, school, military center, prison, form and justice orient other west world. the modern Town medium meant to confirm power of Dutch colonial. Article with approach of this ekohistoris can be developed to become study materials to comprehend Dutch colonial strategy in confining traditional power very sacral with power completely reality, propan, completely iptek and is valuable of power of politics, economic and social prestige.

Keyword: Settlement of Town; Traditional landcape; Modern landcape.

1. Pendahuluan

Pada umumnya di Asia Tenggara, kita dapat melihat bahwa perkembangan kota-kota modern banyak dibentuk berdasarkan warisan sejarah masa sebelumnya. Dalam kajian tentang masalah perkotaan, beberapa aspek penting yang memainkan peranan penting adalah keadaan demografi, teknologi, organisasi, dan lingkungan. Dengan demikian aspek-aspek itu penting untuk dipahami, karena adanya faktor yang saling kait mengkait (Gist dan Fava, 1974: 52) Dalam dinamika sejarahnya, banyak kota-kota itu terlahir sebagai akibat pusat-pusat politik tradisional seperti pusat-pusat istana kerajaan, pusat-pusat perkembangan perdagangan seperti di daerah pegunungan, demikian pula di pelabuhan atau wilayah pesisir pantai. Dalam perkembangan selanjutnya tampaknya terjadi pergeseran pusat-pusat perdagangan dari pegunungan ke pantai. Perpindahan itu seringkali terjadi karena dinamika politik, di pedalaman sebagai akibat perkembangan politik di tingkat internal

yang menyebabkan keinginan untuk memisahkan diri, maupun serangan dari kerajaan-kerajaan lainnya. Pengalaman sejarah seperti itu dapat kita lihat dari tumbuh dan berkembangnya kota Bangkok di Thailand maupun Singaraja di Bali yang kemudian sebagai pusat perkembangan politik, ekonomi dan budaya di Bali Utara. Nama Singaraja kemudian menjadi ibu kota kerajaan Buleleng yang terletak di Bali Utara yang memiliki peranan penting dalam percaturan politik dan ekonomi di Nusa Tenggara.

Secara umum pertumbuhan fisik kota-kota di Jawa diawali dari keraton sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Pendirian kerajaan di suatu tempat tidak semata-mata di dasarkan atas kondisi geografis dan fisi tanah saja, tetapi juga menyangkut berbagai dimensi seperti religius, kultural dan filsafat. Dimensi religius tersirat pada kedudukan raja/ratu sebagai "*syyyidin panatagama kalifatullah*" dalam masyarakat dahulu ada pandangan bahwa raja adalah wakil Tuhan yang memerintah di bumi ini. Kadar ketuhanan pada setiap manusia bersifat hierarkhis, dengan raja dipandang sebagai pusat di dunia, raja mendapat predikat manusia *linuwih*, konsep "rasa allah" ini menjadi mengerucut dan membentuk *manunggaling kaula-gusti* (Khairuddin, 1995 : 1).

Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara menurut pandangan Gelderen (1982:6), bahwa ibu kota kerajaan dipandang mewakili seluruh negeri, ibu kota bukan saja menjadi pusat politis dan kebudayaan dari suatu kerajaan, tetapi juga merupakan pusat magis dari kerajaan. Pada abad ke-19 pelaksanaan upacara selalu mengelilingi ibu kota kerajaan, termasuk di dalamnya upacara ngaben, potong gigi, penobatan raja dan upacara bhuta yadnya besar lainnya. Kebesaran raja juga ditunjukkan dengan mengadakan upacara-upacara besar dengan dengan mengerahkan seluruh potensi kerajaan. Clifford Geertz (1980:21) menyebutkan sebagai negara teatre dengan raja-raja dan pangeran sebagai impresano-impresananya, pendeta sebagai sutradara, para petani sebagai aktor pendukung penata panggung, dan sekaligus penonton setianya. Serimonialisme kerajaan dipandang sebagai daya gerak dari perpolitikan istana, dan ritual massa bukanlah alat untuk mendukung negara tetapi negaralah sebagai alat untuk menggelar ritual massal itu. Dengan demikian maka secara politis istana dan ibu kota kerajaan secara bersama-sama merupakan mikrokosmos dari suatu tatanan supranatural, atau suatu gambaran dari alam semesta dalam skala kecil. Kerajaan dan istana bukan saja sebagai pusat anutan, tetapi juga sebagai paradigma dari tatanan sosial politik dari kerajaan secara umum, sehingga dapat dikatakan ibu kota kerajaan beserta isinya dipandang sebagai negara itu sendiri.

Gunung Meru sebagai pengganti Gunung mandara dipandang sebagai gunung kahyangan, dengan demikian untuk mewujudkan gunung Meru itu di alam nyata, kerajaan menciptakan pusat persembahyangan kerajaan dengan membuat perwujudan gunung Meru/Mandara dalam pura inti kerajaan. Lingga sebagai perwujudan Ciwa yang berstana di gunung dibuat di pura pusat kerajaan, parit atau lorong yang dibuat kerajaan sebenarnya dipandang sebagai simbol samudera di jagad raya. Demikian pula bentuk gapura yang di atasnya berisi simbol-simbol gunung dan lingga dimaksudkan sebagai sarana untuk mendapat perlindungan secara religius magis (Gelderen, 1982 : 10). Dengan demikian secara magis kerajaan menjadi pusat kosmis yang bersifat religius magis dan dijadikan anutan dan ideologi pendukungnya.

Kesakralan kerajaan akan menjadi hilang atau penghuninya (raja dan keturunan) mendapat musibah, seperti dapat diserang dengan mudah oleh musuh, memiliki keturunan gila. Cara untuk dapat menjaga kelangsungan kesakralan kerajaan dengan memindahkan kerajaan. Kerajaan Buleleng dalam beberapa sumber disebutkan telah mengalami perpindahan pusat kerajaan, dari desa Panji, Sukasada, Buleleng. Walaupun tidak selamanya kenyataan yang menunjukkan perpindahan pusat kerajaan itu sebagai akibat dari musibah kemanusiaan yang ada pada raja atau kerajaan, bisa jadi pula perpindahan terjadi karena adanya strategi untuk mengembangkan sayap kekuasaannya.

Raja dan istananya dipandang sebagai bentuk mikrokosmis yang religius magis, raja dipandang sebagai *Dewa Nyalantara*. Secara konseptual pandangan ini disebut *kultus dewa*

raja, maksudnya raja disembah, dipuja sebagaimana layaknya dewa di dunia ini. Dengan demikian gambaran Bhuana Agung akan ada pada istana raja sebagai perwujudan raja sebagai ista dewa dalam konteks mikro (*Bhuana Alit*)

Kota kolonial yang bercitra baratakan sangat berbeda dengan kota kerajaan di Indonesia. Demikian pula ciri kota kerajaan di Indonesia dibedakan menjadi kota kerajaan yang berada di pinggir pantai dengan kota kerajaan yang ada di pedalaman. Kajian Tjiptoatmodjo (1983) mengenai “ Kota-kota Pantai di Sekitar Selat Madura (Abad XVII sampai Medio Abad XIX)” merupakan salah satu model kajian sejarah di pinggir pantai. Kerajaan pinggir pantai erat kaitannya dengan perdagangan dan penguasaan lintas laut sebagai sumber ekonomi kerajaan.

Kajian tentang Bali Utara telah banyak dilakukan oleh para peneliti, seperti Pageh (2002) yang mengkaji perdagangan komoditas lokal di Pantai Utara Bali, Peranan Tengkulak dan Subandar di Kota Singaraja (1998). Mudana (2004) yang membahas Multikulturalisme dalam Kehidupan Masyarakat Bali Utara (Studi Sejarah Sosial dalam Rangka Pengembangan Media tentang Berkehidupan Bertoleransi). Agung Mas (1989) membahas Singaraja sebagai kota kolonial, Suryawati (1985) membahas Singaraja sebagai kota dagang. Putra Agung (1974, 1983) menulis tentang pertentangan kasta, dan dampak pendidikan terhadap mobilitas sosial di Bali Utara. Dari semua tulisan tersebut sampai saat ini belum ada yang membahas secara khusus tentang *landcape* tradisional (geo-religius) dengan *landcape* moderen yang berorientasi pada kehidupan duniawi atau rasional yang ditunjukkan dengan adanya sanitasi lingkungan, jalan raya besar untuk transportasi hiburan, tempat hiburan, sekolah, pusat tentara, pengadilan dan wujud orientasi dunia barat lainnya.

Penampakan lingkungan dengan setting kembar di Kota Singaraja, yang masih tersisa sebagai bahan pembelajaran pada generasi muda saat ini, sangat menarik untuk dikaji. Dari setting dua dasar yang berbeda itu generasi masa kini dapat belajar dari sejarah dalam penataan lingkungan kota dengan dasar filosofi yang berbeda dapat menghasilkan penampakan yang berbeda.

Sisa sejarah dua setting yang berbeda ini dengan gamblang dapat menjelaskan *mainstreams*-nya masing-masing, dan dengan mudah juga dijelaskan bahwa orientasi yang berbeda dapat mewujudkan hasil (penataan lingkungan) yang berbeda. Dari dua setting tersebut pula memberikan pilihan pada masyarakat apakah akan mengikuti setil barat (Belanda) atau gaya tradisional (kerajaan) (lihat uraian Sudjana, 2001).

Penataan lingkungan dengan konsep Tri Hita Karana, ulu-teben yang jelas dengan posisi kerajaan sebagai sentrum berbagai kekuatan dapat ditelusuri dari lokasi pura Kahyangan Tiga kerajaan, letak pasar, lapangan, catus pata jalan raya kerajaan, dan pemandian kerajaan di masa lalu (Geldern, 1962). Demikian pula adanya upacara-upacara besar kerajaan yang dipergunakan oleh raja-raja sebagai sarana untuk menunjukkan kekhasan kerajaan pada abad ke-19 (Geertz, 1980).

Bentang alam yang ditata menggunakan konsep moderen sangat memperhatikan sanitasi lingkungan, baik sirkulasi udara (dengan sempadan jalannya), drainase (saluran-saluran airnya), hiburan dengan rumah bolanya, kesehatan dengan lapangan olah raga dan rumah sakitnya, ilmu pengetahuan dan sarana pendidikan dengan sekolahnya, sumber air dan energi sangat diperhitungkan.

Demikian pula sarana transportasi moderen dengan jalan-jalan besar dirancang agar roda empat dapat berpapasan dengan nyaman. Sarana ekonomi dengan pasar dan pelabuhan yang ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Tidak kalah pentingnya keamanan dan kekuasaan agar tetap terjaga dengan pembangunan sarana militer di daerah perbatasan yang dapat melindungi daerah kekuasaan, bahkan di daerah tertentu dibangun benteng besar agar daerah kekuasaannya aman dari serbuan musuh.

Sarana kota moderen lainnya adalah adanya penjara, pengadilan dan sebagainya sangat diperlukan untuk mengukuhkan kekuasaan yang harus dipertahankannya, yang sewaktu-waktu pasti akan terjadi ketidakpuasan penduduk pribumi. Sehingga dengan

demikian, strategi untuk mempertahankan diri, dengan menata kota yang memenuhi standar moderen itu dapat ditelusuri dari landscape kota Singaraja sebagai kota kolonial (Agung Mas, 1965 : 33)

Bagaiamanapun juga, pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan negara moderen kolonial di Singaraja disesuaikan dengan kepentingan kolonial dan fungsinya. Semuanya itu dapat dikaji dari lokasi sarana dan prasarana kota kolonial Singaraja. Secara teori kekuasaan kolonial ada yang menguasai secara langsung (*direct role*) dan ada pula secara tidak langsung (*indirect role*), penguasaan Buleleng oleh kolonial Belanda dapat dilihat dalam konteks ini melalui studi banding. Studi model ini, belum banyak dilakukan orang, dengan demikian dalam kajian ini sangat menarik untuk dilakukan, sehingga kajian ekohistoris ini dapat bermanfaat. Bahkan dapat dikembangkan menjadi pembelajaran untuk memahami strategi kolonial Belanda dalam mengurung kekuasaan tradisional yang sangat sakral (serba religius magis) dengan kekuasaan yang serba nyata, profan, serba IPTEK dan bernilai kekuasaan politik, ekonomis dan *prestige* sosial (Kartodirdjo, 1977: 8-9).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian sejarah. Metode ini terdiri dari empat tahapan yakni; heuristic (menemukan jeja-jejak sejarah, kritik sumber (yang terdiri dari kritik interen dan eksteren), interpretasi (menafsirkan fakta-fakta yang telah melalui proses kritik), dan historiografi (penulisan sejarah setelah langkah-langkah dari heuristic sampai interpretasi).

3. Hasil dan Pembahasan

Penataan kota tradisional Buleleng Dengan Landscape Tradisional.

Pembangunankota tradisional di mulai di Sukasada (puri Sukasada), berada sekitar 5 Km di sebelah timur Desa Panji. Pembangunan Puri Sukasada di sebut dalam tahun Chandrasangkala berbunyi "Rasa Nora Bhuta Wani", sama dengan tahun 1506 Caka (1584 M). Ibu kota kerajaan Buleleng dibangun oleh Ki Barak Panji Sakti, yang masih keturunan Dalem Sagening, raja Bali yang berpusat di kraton Gelgel.

Lokasi pemerintahan pada mulanya di Desa Panji, kemudian dipindahkan ke Sukasada. Selama berpusat di Sukasada, Ki Barak Panji Sakti sangat bergairah karena dapat menundukan kerajaan Blambangan. Hal ini berakibat putra mahkota kerajaan Blambangan melarikan diri ke Solo, bernama Ki Dewa Mas dan Ki Dewa Mas Pahit. Kemasyuran raja Buleleng ini didengar oleh raja Solo. Untuk meredakan suasana maka di adakan pertemuan antara Raja Mataram Paku Buwono I, dan Raja Pasuruan (Untung Surapati). Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan : 1) Surapati tetap raja Pasuruan di Pasuruan, 2) Pangeran Mas tetap raja Kediri. 3) Raja Buleleng diberi gelar Anglurah Panji Sakti, dan dapat hadiah 2 ekor gajah, dan 800 orang Islam akan dijadikan wadua sebagai pampasan perang (ganti rugi).

Setelah merasa aman Panji Sakti meninggalkan Blambangan pergi ke Bali Utara, mengangkat putranya bernama I Gusti Ngurah Wayan sebagai Raja Blambangan. Ternyata gejolak untuk merebut tahta Blambangan terjadi sebanyak dua kali. Dalam pemberontakan ini putra mahkota Panji Sakti bernama Danudresta meninggal. Keadaan ini memaksa raja Buleleng mengadakan koalisi dengan kerajaan Mengwi, Tabanan, dan Negara untuk menyerang Blambangan. Namun setelah kemenangan di dapat terjadi ketidakpuasan dalam pembagian kekuasaan oleh pihak Tabanan. Untuk itu Ki Barak Panji Sakti mengadakan gangguan dengan serangan mental yaitu mengganggu keberadaan Pura Batukaru yang ada di Tabanan. Sejarah mencatat semenjak kejadian tersebut bintang Ki Barak Panji Sakti *rered* (memudar).

Latar belakang perpindahan kerajaan Buleleng ke puri Buleleng diawali oleh kesedihan Panji Sakti yang amat sangat karena meninggalnya I Gusti Danudresta di Blambangan. Hal ini menjadikan Panji Sakti sering mengasingkan diri di sebelah utara Puri

Sukasada, di dekat “Ibu Leleng”, *Penunggun Tegal*, yaitu sebuah tugu bersayap, sering digunakan sembahyang untuk mengurangi kegundahan hati. Tempat ini diperkirakan ada di sekitar Pura Balai Agung yang berada di hulu Kerajaan Buleleng (Simpén, 1989:16).

Pembangunan istana raja Buleleng dibangun lengkap dengan pemandian, pasar, lapangan, dan perlengkapan istana lainnya menyerupai sistem macapat sebagaimana layaknya istana raja-raja Hindu yang ada di daerah lain. Kota Singaraja dibangun tanggal 30 Maret 1604, 10 tahun kemudian dari pendirian istana Sukasada, ditandai dengan pembangunan Monumen Patung Singa yang menjadi lambang Kota Singaraja (Ginarsa, 1986 : 14). Secara garis besar lokasi pura, puri dan pemukiman penduduk di kawasan *lanscape* tradisional kerajaan Buleleng dapat digambarkan maketnya sebagai berikut :

Wawasan geo-politik dan geo-ekonomi tokoh Panji Sakti sangat cemerlang pada zamannya, bahkan hingga abad XXI ini. Kehebatan perspektif ke depannya dalam bidang politik dan ekonomi banyak dikagumi penulis asing. Karena dianggap memiliki perspektif politik dan ekonomi yang tajam dan berwawasan jauh ke depan. Sebagai contoh Panji Sakti dalam memperkuat pasukannya. Orang-orang Islam Blambangan di bawa ke Bali dijadikan pasukan khusus kerajaan, ditempatkan pada sebuah *enclave* di sebelah Timur Laut Kerajaan Buleleng, bernama desa Pegayaman. Oleh Belanda sendiri, Panji Sakti dianggap sebagai musuh yang sangat berbahaya dari luar Jawa. Dalam bidang ekonomi Panji Sakti ingin menguasai daerah segitiga emas yaitu Gilimanuk-Surabaya-Madura, merupakan daerah pusat aktivitas ekonomi yang sangat potensial dari zaman ke zaman.

Panji Sakti meninggal pada akhir abad ke-17 diganti oleh I Gusti Ngurah Panji Gede, beliau tidak mempunyai anak laki-laki yang lahir dari permaesuri sebagai *rajeg dalem*, beliau hanya memiliki anak perempuan bernama Ni Gusti Ayu Jelantik Rawit. Pengantian tahta berikutnya menimbulkan ketegangan di dalam istana, antara beliau dengan anak dari I Gusti ngurah Made. Sebagai pengganti I Gusti Ngurah Gede adalah anak dari I Gusti Ngurah Made bernama I Gusti Ngurah Panji Bali, dengan permaesurinya bernama Ni Gusti Ayu Jelantik Rawit (sepupunya). Pusat istana masih di Sukasada, sedangkan Puri Buleleng hanya sebagai tempat bercengkrama saja. Ketegangan terus terjadi pada pergantian tahta ketiga, dengan diangkatnya dua penguasa yang berlainan ibu, pertama bernama I Gusti Ngurah panji beristana di Puri Sukasada, yang kedua adiknya bernama I Gusti Ngurah Jelantik beristana di Puri Singaraja. Sejak itu polarisasi kekuasaan yang pada akhirnya memperlemah dinasti Panji Sakti. Keadaan dimanfaatkan oleh Kerajaan Karangasem untuk menaklukkan Buleleng, dan berhasil menguasai Kerajaan Buleleng pada masa pemerintahan Raja I Gusti Gede Karangasem. Sementara keturunan Panji Sakti, diperlemah dengan cara halus, yaitu dengan diberi jabatan yang jauh dari rakyat, apabila membangkan maka ditindak dengan kekerasan.

Pendirian suatu kerajaan tentu dibutuhkan beberapa syarat-syarat geografis tertentu, misalnya daerah yang subur, ramai, cukup air, pelayaran dan daerah perdagangan yang strategis (Pitono, 1961 : 19). Seperti yang telah diuraikan dalam topografi Buleleng yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu : Buleleng Barat, Buleleng Tengah, dan Buleleng Timur. Bagian tengah merupakan lokasi kerajaan, yang keadaan tanahnya subur, datar dan banyak sumber air tawar dan dekat dengan pelabuhan Buleleng yang merupakan pelabuhan alam. Melimpahnya sumber air tawar di daerah Buleleng tengah merupakan akibat dari adanya rembesan air danau Buyan-Tamblingan dan pegunungan hijau dan hutan lindung yang ada di daerah hulu.

Fokus kajian lansdcape kerajaan adalah puri Buleleng karena daerah kerajaan ini yang sepertinya bersanding antara landscape yang didasari filsafat Bali yang sudah mendunia yaitu Tri Hita Karana, *rwabhineda*, *nyegara-gunung*, harmonisme (keseimbangan). Kerajaan tradisional selalu diikuti oleh pagu tradisional yaitu kerajaan dilengkapi dengan pura kerajaan, alun-alun pemandian umum, *catuspata* dan lorong keliling istana kerajaan. Setting Puri Buleleng tidak terlalu tanpak sebagaimana halnya pada kerajaan-kerajaan lain di

Bali. Ada jaba sisi, jaba tengah, dan jeroan. Jaba sisi sering juga disebut bencingah. Umumnya dilengkapi dengan wantilan kerajaan

Landscape Kolonial Belanda: Strategi Mengurung Kerajaan Buleleng

Buleleng jatuh ke tangan Belanda setelah melalui perang antara kerajaan Buleleng dengan pemerintah Hindi Belanda sebanyak beberapa kali, yakni tahun 1846 yang ditandai dengan jatuhnya kota Singaraja. Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke benteng Jagaraga. Untuk menundukan Buleleng di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik, Belanda harus mengadakan ekspedisi militer sebanyak dua kali yakni tahun 1848 dan tahun 1849. Karena penghianatan beberapa pasukan gabungan terutama dari Karangasem dan Bangli, maka tahun 1849, benteng Jagaraga berhasil ditundukan.

Jatuhnya Jagaraga tahun 1849 ini, merupakan tonggak pemerintahan Belanda di Bali Utara. Buleleng diletakan di bawah pengawasan langsung residen Besuki. Setelah jatuhnya Buleleng tahun 1849, maka pusat perdagangan dipindahkan dari Kuta Badung ke Bali Utara. Sejak tahun 1850-an, kota Singaraja terus dibenahi sarana dan prasarana pemerintahan, sarana perkantoran, perdagangan, serta kebutuhan lain untuk membangun kekuasaan di Bali dengan berpusat di Singaraja, sehingga lambat laun Buleleng tumbuh menjadi pusat kekuasaan, pusat politik dan dagang yang ramai di Nusa Tenggara. Pernyataan ini didukung oleh laporan asisten residen Waanders (1859) yang menafsir hasil tembakau Buleleng pertahunnya sekitar 11.000 pikul, diperdagangkan ke luar 7.000 pikul, dengan harga per pikul f. 8,5. Sedangkan sisanya sebanyak 4.000 pikul untuk konsumsi setempat. Selain tembakau Buleleng adalah penghasil kapas yang pertahunnya sekitar 3.500 pikul, dengan harga per pikul f 6.5. Hasil perdagangan diekspor ke Singapura dan Jawa. Demikian pula perdagangan Candu pertahun sekitar 300 peti, walaupun jumlahnya lebih dari itu, dan banyak diperdagangkan melalui pasar gelap (*smokelan*). Pelaku smokelen terbesar di Singaraja, dilakukan pedagang-pedagang Cina, Bugis dan Mandar (Waanders, 1859)

Kota Singaraja semakin penting artinya setelah dijadikan ibu kota Keresidenan Bali dan Lombok tahun 1875. Maka penataan kota semakin berkembang pula, mengacu pada pendapatnya Evers (2002), Singaraja dapat dikategorikan dalam kota-kota kecil penghubung, yakni sebagai simpul-simpul perdagangan regional dan lokal.

Buleleng sebagai kota kolonial dan kerajaan terletak di pinggir pantai, dengan demikian lebih erat kaitannya dengan ciri-ciri kota Pantai. Seperti kajian van Leur lintas yang akhirnya mewujudkan pusat-pusat perdagangan yang menyisir pantai merupakan ciri dari kawasan Asia tenggara, demikian kutip Tjiptoatmojo (1983:9).

Kota mempunyai peranan yang penting untuk terlaksananya kegiatan di berbagai bidang. Seperti yang dikemukakan Ibnu Khaldun, kota memiliki berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, di antaranya perdagangan, kerajinan, keagamaan pengadilan, pengajaran, arsitektur dan sebagainya (Ibnu Khaldun, 1970 : 297-332). Kota Singaraja juga merupakan kota termaju di Asia tenggara pada zaman kolonial (Pageh, 1998). Pertanyaan Hendri Pirene tentang kota di Eropa pada abad pertengahan, memberi penjelasan tentang adanya kota disebabkan adanya faktor-faktor penyebab, diantaranya : kebutuhan akan tempat untuk melaksanakan keperluan bersama, diantaranya mengenai upacara keagamaan, penyelenggaraan pasar, pertemuan politik dan pengadilan, juga kebutuhan tempat berlindung di masa perang (Pirene, 1969 : 56). Sedangkan Gideon Sjoberg menyebutkan syarat-syarat mutlak berdirinya sebuah kota, seperti basis ekologis yang memadai, teknologi yang maju dan adanya suatu kompleks organisasi sosial, terutama struktur kekuasaan yang cukup maju (1965:25).

Satu hal penting yang kerap mencuat ketika membicarakan permukiman di kota adalah keterkaitan antara kekuasaan, modal, dan urbanisasi (Bagas Yusuf Kausan, Putri Agus Wijayati, dan Atno, 2019), hal ini dapat Pembangunan Kota Singaraja abad ke-20 mengalami perkembangan yang pesat disebabkan transformasi kota Singaraja menjadi kota modern sepanjang abad ke-20. Pentingnya abad ini karena sering diidentifikasi sebagai era

dimana meluasnya kemodernan di Indonesia. Konsep utama yang dipergunakan adalah modernitas, yang dalam tulisan ini bermakna waktu (zaman baru), dan epistemis (kesadaran baru). Modernitas berarti "pengalaman" melalui upaya terus menerus untuk perbaikan kehidupan, mencapai kemajuan, atau menyikapi kondisi dan proses modernisasi.⁴ Seperti yang disinyalir Georg Simmel atas modernitas dan perkotaan, bahwa modernisasi memberikan keuntungan dalam kehidupan, pengaruh uang terhadap masyarakat modern, yang dapat dijelaskan pada pengalaman waktu, ruang dan hubungan sebab akibat (Simmel, 1978; Ritzer & Goodman, 2011, terj: 550-551). Dalam perkembangannya kehidupan modern adalah sebuah "dunia yang tak terkendali" dengan langkah, cakupan, dan kedalaman perubahannya. Modernitas tidak mengambil jalan tunggal, bukan satu bagian, tetapi terdiri dari sejumlah bagian berlawanan dan saling bertentangan, dan lebih dikenal dengan konsekuensi modernitas (Giddens, 1990).

Sebuah kota moderen dengan sarana transportasi baik darat maupun laut sangat memegang peranan penting karena mobilitas penduduk yang sangat tinggi merupakan ciri masyarakat perkotaan. Teori Charles Cooley menyebutkan kota-kota biasanya muncul di jaringan sistem transportasi, seperti di tempat pemberhentian alat transportasi, tempat untuk memindahkan barang yang diangkut seperti muara sungai pelabuhan, dan sebagainya.

Kalau dilihat secara ekonomis kota dapat digolongkan menjadi dua tipe, yaitu konsumen dan kota produsen (Bouman, 1982 : 95). Sebagai kota konsumen sudah barang tentu barang-barang yang dikonsumsi di kota tersebut tidak ada yang diproduksi di kota itu, sedangkan sebaliknya bagi kota produsen, hampir sebagian besar kebutuhan kota bersangkutan diproduksi sendiri. Sedangkan terkait dengan hasil pertanian sebagian besar ada di pedesaan, sedangkan kota adalah tempat untuk menjual hasil pertanian tersebut, dengan demikian hinterland sebuah kota sangat memegang peranan penting, dalam menopang maju mundurnya perdagangan di sebuah kota (Louer, 2001). Secara lebih jelas penataan kota Singaraja zaman kolonial, dapat dilihat pada maket di bawah ini:

Secara garis besar ciri-ciri bangunan yang berdiri dalam *landscape* (tata ruang) yang dirancang kolonial, seperti terlihat dalam maket 02 di atas adalah lokasi bangunan terkait dengan kepentingan Belanda di antaranya: (1) perempatan di depan Puri Buleleng dibangun tugu jam besar, mengingatkan prinsip barat *time is money*" waktu adalah uang, sehingga jam adalah simbol barat yang dipajangkan di depan publik dan terutama di depan (bencingah) kerajaan. (2) perpustakaan (Gedong Kirtya) yang melambangkan orang barat adalah penggemar dan mengadopsi budaya timur yang dapat dijadikan senjata untuk mengajegkan kekuasaannya (menikam lawan dengan kekuatan lawan), (3) penjara adalah lambang kekuasaan dan lambang keberadaannya taat pada hukum, sebagai pengemban terhadap hak azasi manusia. (4) rumah jabatan yang megah (simbol power) dan status sosial dan prestise dalam kekuasaannya, (5) kantor megah dan besar serta strategis untuk menunjukkan kewibawaannya pada publik, (6) raad kertha, lambang kewibawaan hukum, dan legitimasi atas berbagai keputusan yang diambil oleh kolonial, berdasarkan perangkat hukum/perundang-undangan yang dibangun agar dapat diberlakukannya hukum karet berdasarkan kepentingannya. (7) sempadan rumah yang mendekat jalan sangat luas, dengan maksud jauh dari keramaian dan keributan di jalan raya, di samping untuk pemandangan bagi pengguna jalan, dan juga untuk pelebaran jalan di masa depan ketika kendaraan sudah jenuh, (8) Sekolah rakyat (SR dan HIS) untuk menunjukkan diri bahwa pendidikan itu harus lebih banyak mengembangkan kecerdasan bersama dengan secara terselubung memamerkan kelebihan dan status sosialnya kalau dibandingkan dengan orang Bali pada umumnya, kecuali para anak raja/bangsawan, (9) rumah sodok (bilyard) untuk hiburan malam, dengan persyaratan khusus bagi pribumi, yang dapat masuk rumah sodok adalah orang-orang yang dapat menunjukkan status sosial dengan membawa sepeda jengki atau triwangsanya, (10) tanah lapang untuk olahraga, upacara ala barat, hiburan publik seperti pasar malam dan sebagainya, (11) Gereja (lambang keagamaan orang barat), taman hiburan (lilagraha) yang sesungguhnya yang sesungguhnya berupa taman ruang publik di

jantung kota, (12) Di tengah kota ada pertokoan, pasar pabean, dan pelabuhan Buleleng (Pabean Buleleng) yang dijadikan pusat perdagangan ekspor berbagai hasil pertanian dan peternakan lokal dan impor barang kebutuhan masyarakat lokal baik Bali Utara maupun kawasan Bali Lombok. Disampingnya ada pelabuhan penyangga yaitu pelabuhan Sangsit dan pelabuhan Temukus. (13) Terdapat juga tempat hiburan dan penginapan terutama hotel perama di Buleleng, terletak di sebelah timur pelabuhan Buleleng. (14) Di Bagian barat dan timur perbatasan ditempatkan batalyon (garnisium) untuk menjaga perbatasan dan menjaga keamanan kota yaitu di Banyumala dan Kampung Tinggi. (15) Tempat mesum yang sekarang terkenal penjaja seks komersial (PSK atau WTS) saat kolonial ada di kampung delapan, terletak di sebelah timur SD Center Banjar Bali.

4. Simpulan dan Saran

Dari hasil dan pembahasan yang telah disampaikan diatas makan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Konsepsi dan tata ruang yang berciri tradisional di Kerajaan Buleleng landscape tradisional yang bertumbuh dari daerah Panji ke Sukasada dan terakhir di Puri Buleleng sebelum akhirnya menjadi daerah bawahan kekuasaan kerajaan Karangasem dan kolonial Belanda. Secara tradisional pembangunan kerajaan selalu mengikuti pagu filosofis Bali apakah *Nyegara- Gunung, Tri Hita karana, Rwabhineda (luwan teben)*. Buleleng pernah jaya pada zaman Panji Sakti, terutama kalau dilihat dari perkembangan kerajaan sejak mulai dikembangkan tokoh legendaris Panji Sakti, sampai akhirnya dapat mengembangkan sayap bulan hanya di Buleleng, tetapi juga ke luar Buleleng (Blambangan). Landscape tradisional terutama Puri Buleleng tanpak hulunya adalah Pura Desa Agung, di bagian perutnya adalah Kerajaan Buleleng, dan kakinya adalah Pura Dalem dan Pura Segara di sebelah barat Pelabuhan Buleleng. Dasar Pengembangannya adalah religio-geomagis. Sedangkan landscape kolonial yaitu penataan lingkungan berdasarkan konsep sanitasi kesehatan lingkungan dan fungsionalisme bebrbagai struktur barat yang terutama di arahkan untuk kenyamanan lalu lintas publik dan sarana publik lainnya, seperti: rumah sakit, sekolah, tempat hiburan, tanah lapang, sarana komunikasi (radio, kantor post, dll), tempat persembahyangan, sarana perekonomian (pasar, pelabuhan) dan pertahanan dan keamanan. 2) Gambaran landcape Kota Singaraja sebagai kota kolonial Belanda dapat dijabarkan sebagai berikut: sarana dan prasarana publik seperti bersanding antara landscape tradisional dengan landscape kolonial, karena landscape tradisional berdiri sebelum landscape moderen dibangun oleh kolonial Belanda, maka seperti sarana dan prasarana yang dibuat Belanda selalu sebagai sebagai tandingan atau pengimbang sarana dan prasarana yang telah dibangun dengan konsep tradisional Bali. Landscape tradisional akhirnya terkepung dan akhirnya rakyat Buleleng terutama elite kerajaan lebih menyenangi menggunakan sarana dan prasarana kolonial dibandingkan dengan sarana yang dibangun oleh leluhurnya. Dalam penyusunan landscape suatu wilayah, dapat diketahui nilai budaya yang berbeda menghasilkan wujud fisik yang berbeda terutama dasar-dasar orientasi pengembangannya. Landscape tradisional yang berorientasi ke atas (religio- magis), yaitu pengembangan kawasan berdasarkan konsep lokal genius Bali yang ternyata mengembangkan tata ruang selanjutnya sampai saat ini tanpak masih eksis, walaupun banyak yang telah diubah sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya. Sedangkan landscape kolonial berorientasi bisnis dan kesehatan fisik (agronomis-antroposentris), yaitu pengembangan kawasan dengan konsep agronomic yang berorientasi pada anitasi lingkungan alam.

Daftar Pustaka

Agung, Anak Agung Gde Putra. 1983. *Dampak Pendidikan Terhadap Perubahan Sosial di Bali Utara*. Tesis (S-2) : UGM.

Bouman, PJ. 1982. *Sosiologi Fundamental*. Ratmoko (penerjemah). Jakarta : Djambatan

- Evers, Dieter Hans dan Korff Rudiger. 2002. *Urbanisasi di Asia Tenggara*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Geertz, Clifford. 1980. *Negara : The Teatre State in Nineteenth-Centuary Bali*. New Jersey : Princenton University Press.
- Gelderen, Robert Heine. 1982. *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Jakarta : Raja Waki.
- Ginarsa, I Ketut. 1986. *Sejarah Lahirnya Kota Singaraja*. Singaraja : Indra Jaya
- Noel P. Gist dan Sylvia Fleis Fava. 1974. *Urban society*. New York: Harper and Row
- Pageh, I Made. 1998. *Dari Tengkulak Sampai Subandar : Perdagangan Komunitas Lokal di Pantai Utara Bali Pada Zaman Kolonial Belanda*. Yogyakarta : Tesis S-2 UGM (Unpublish).
- Khairuddin, H. 1995. *Filsafat Kota Yogyakarta* : Yogyakarta.
- Khaldun, Ibn. 1970. *The Muqaddimah: An Introduction to History*. Translated from the Arabic by Frans Rosenthal. New York : N. J Dawoo.
- Lauer, Robert. 2003. *Perpektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta ; Bina Cipta.
- Nas, P. J. M. 1979. *Kota di Dunia Ketiga*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Pirene, Hendri. 1969. *Medieval Cities and The Revival of Trade*. Princeton : New Jersey
- Sartono Kartodirdjo. 1977. *Pengantar dalam Masyarakat dan Kelompok Sosial*. Sartono Kartodirdjo (ed). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Simpem, I Wayan. 1989. *Babad Kerajaan Buleleng*. Denpasar : Cempaka.
- Waanders, F.L. van Bloemen, "Aanteekeningen omtrent de Zeden en Gebruiken der Balinezen, inzonderheit die van Boeieleeng" TBG, DI. VIII. 1859)
- Giddens, Anthony 1990. *The Consequences of Modernity*. Stanford, Calif.: Stanford University Press
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2011 *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta:Kencana.
- Bagas Yusuf Kausan, Putri Agus Wijayati, dan Atno. 2019. "Kampung-Kota dan Permukiman Kumuh di Kota Bandung Tahun 1965-1985". *Jurnal of Indonesia History*. Volume 8 (1) Tahun 2019. Hlm 53-61.